



# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

## DINAS PERIKANAN



## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan .....	3
I.4 Sistematika Penulisan .....	4

### BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	6
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	7
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan .....	8
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan .....	8
2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.....	8
2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap target Capaian Program RENSTRA SKPD .....	9

2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor- Faktor Penyebab Tersebut .....	9
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>12</b>

## BAB I **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024 merupakan hasil integrasi dari rencana pembangunan pusat maupun regional sektor Kelautan dan Perikanan serta hasil identifikasi pada desa-desa yang ada di Kab. Bolaang Mongondow Utara.

Pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024, berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026, dengan dokumen RKPD, Renja kementerian dan Renja Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam rangka merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian RPJMD serta menjaga keberlanjutan Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renstra PD, maka Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 berdasarkan pada:

- 1) UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 80);

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.
- 7) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kelautan dan perikanan kabupaten bolaang mongondow utara.
- 8) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Staretegis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini adalah untuk dijadikan sebagai tolak ukur Penilaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023. perubahan Rencana Kerja adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan dan pengurangan pagu indikatif, penambahan dan pengurangan kelompok sasaran dan perubahan lokasi , perubahan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang sangat dibutuhkan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga tercipta sinergitas dalam melaksanakan program pemerintah terutama dibidang kelautan dan perikanan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, menggunakan pokok bahasan dalam penulisan renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen dan substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan triwulan II dan Capaian

Renstra SKPD.

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, mengacu apda APBD Tahun Berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun-tahun sebelumnya.

## BAB III. PENUTUP

Merupakan Bab penutup

**BAB II**

**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**TAHUN 2024**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan pada Tahun 2024 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Yang Dibiayai Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 , Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mendapatkan

**tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II tahun 2024**

SKPD/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=4/3
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Percentase kelengkapan administrasi kepegawaian</b>	100	46	46,47
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi keuangan perangkat</b>	100	99,00	99,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	14	9	64,29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Percentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	37,27	37,27
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100	0	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	30	0	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10	0	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Percentase administrasi umum perangkat daerah</b>	100	28,25	28,25
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	100	0	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	0	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	39,12	39,12
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	16,02	16,02
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Jasa Surat menyurat	100	24,05	24,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Percentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	14,57	14,57
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Percentase Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	100	18,25	18,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	100	39,60	39,60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan	100	1,70	1,70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara	100	0	-
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	5700	2169	38,05
<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab / Kota</b>	<b>Jumlah Kelompok Nelayan yang mandiri</b>	2800	35	1
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	30	30
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>	203	44	21,67
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	<b>Percentase Kelompok Pembudidaya yang memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</b>	16	30	187,5
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	umlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	30	300
<b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	<b>Jumlah luas potensi lahan budidaya yg terkelola.</b>	50	50	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53	4	8,23

**tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II tahun 2024**

SKPD/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja			Rencana Pagu Indikatif Perubahan Renja 2024	Bertambah/ Berkurang	Prioritas		Perangkat daerah Penanggung Jawab
		APBD 2024	P- APBD 2024	PAGU APBD 2024			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5=4/3					
				<b>2.543.890.401,00</b>	<b>2.594.871.567,00</b>	50.981.166,00			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Percentase kelengkapan administrasi kepegawaian</b>	100	100	2.152.638.101,00	2.203.619.267,00	50.981.166,00			<b>DINAS PERIKANAN</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100,00	1.911.349.646,00	1.943.552.132,00	32.202.486,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14	14	1.733.341.526,00	1.784.322.692,00	50.981.166,00			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Percentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	178.008.120,00	159.229.440,00	(18.778.680,00)			
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100	100	18.050.000,00	7.000.000,00	(11.050.000,00)			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	30	0	11.050.000,00	-	(11.050.000,00)			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	10	0	7.000.000,00	7.000.000,00	-			
<b>Administrasi Umum Perangka</b>	<b>Percentase administrasi umum perangkat daerah</b>	100	0,00	100.131.450,00	120.960.130,00	20.828.680,00			
Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1,00	4.863.750,00	4.863.750,00	-			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Percentase Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	100	100	11.584.300,00	11.584.300,00	-			

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	100	11.364.600,00	11.364.600,00	-			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	72.318.800,00	93.147.480,00	20.828.680,00			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	100	32.517.005,00	41.517.005,00	9.000.000,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Jasa Surat menyurat	100	100	4.988.750,00	4.988.750,00	-			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	100	27.528.255,00	36.528.255,00	9.000.000,00			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah</b>	100	100	90.590.000,00	90.590.000,00	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kenderaan	100	100	39.730.000,00	39.730.000,00	-			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase jasa pemeliharaan dan pajak kenderaan	100	100	46.800.000,00	46.800.000,00	-			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang terpelihara	100	100	4.060.000,00	4.060.000,00	-			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	5700	5700	188.789.400,00	188.789.400,00	-			
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab / Kota	<i>Jumlah Kelompok Nelayan yang mandiri</i>	2800		188.789.400,00	188.789.400,00	-			
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	100	100	188.789.400,00	188.789.400,00	-			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah produksi perikanan budidaya</b>	203	203	202.462.900,00	202.462.900,00	-			

Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	<i>Persentaase Kelompok Pembudidaya yang memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>	16	30	110.948.900,00	110.948.900,00	-			
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	umlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10	30	110.948.900,00	110.948.900,00	-			
Pengelolaan Pembudidaya Ika	<i>Jumlah luas potensi lahan budidaya yg terkelola.</i>	50	50	91.514.000,00	91.514.000,00	-			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	53	53	91.514.000,00	91.514.000,00	-			

alokasi anggaran sebesar Rp. 3.966.987.001 untuk melaksanakan 3 program yang dijabarkan dalam 9 kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perikanan kabupaten Bolaang Mongodow Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 3 program dan 9 kegiatan. Target tingkat capaian kinerja sasaran OPD tahun 2024 dari target produksi perikanan sebesar 5.927 Ton

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Kegiatan per program, Dinas Perikanan termasuk dalam kategori penyerapan kegiatan sampai dengan triwulan II yaitu sebesar 46,63%.

#### **2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada :

- kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut dan Kelengkapannya, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Penambahan Daya Listrik Kantor

## **2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum semuanya memenuhi target kinerja karena masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.

## **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan II belum ada realisasi yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang telah direncanakan.

## **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan**

Adapun faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan yang telah ditetapkan karena :

- Kurangnya anggaran
- Terjadinya perubahan harga satuan belanja sehingga perlu dilakukan penambahan SSH.

## **2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap target Capaian Program RENSTRA SKPD**

## **2.1.6 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil**

### **Untuk Mengatasi Faktor- Faktor Penyebab Tersebut**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan dan capaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan, Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Perikanan Melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah diamanatkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kab/Kota
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Pengelolaan Penangkapan Ikan Diwilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam satu Daerah kab/Kota
  - Pemberdayaan nelayan kecil Dalam Daerah kab/Kota

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil
- Pengelolaan pembudidaya Ikan

## BAB IV

### PENUTUP

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah untuk merumuskan prioritas Program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2024 serta merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tantangan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu untuk mengetahui Program kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan.

Keberhasilan pelaksanaan pelayanan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan secara harmonis dan semua tingkatan, mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat yang lebih tinggi. Peran pemerintah daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman dan komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini disusun sebagai suatu dokumen penjabaran dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui pelaksanaan Musrenbang. Yang telah ditetapkan sebelumnya

Dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai menghambat pencapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun dengan harapan semoga dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program dan kegiatan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, Juni 2024  
**Kepala Dinas Perikanan**  
  
Irawati Ratusmanga, S.Pi  
Nip : 19730323 200801 2 010